

# PEMERINTAH SIAP MELADENI PROTES

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah siap meladeni protes yang diajukan oleh sejumlah perusahaan asal China terkait dengan penggunaan harga batu bara acuan dalam transaksi penjualan 'emas hitam' ke pasar global. Ancaman pembatalan kontrak pun dianggap sebagai angin lalu yang tidak akan memengaruhi performa batu bara nasional.

M. Ryan Hidayatullah  
redaksi@bisnis.com

**K**ementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan mencabut aturan terkait dengan penggunaan harga batu bara acuan atau HBA oleh perusahaan nasional dalam transaksi komoditas itu di pasar global. Protes yang belakangan muncul pun diyakini bakal segera mereda seiring dengan waktu.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menilai bahwa protes yang diajukan oleh perusahaan asing terkait dengan penggunaan HBA untuk transaksi ekspor batu bara nasional sebagai hal yang wajar. Musababnya, kebijakan tersebut memuat aturan baru yang terkait langsung dengan skema bisnis perusahaan.

"Protes itu hal yang biasa. Kami biasa menghadapi protes, tetapi tetap ini adalah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harus diimplementasikan," katanya, Kamis (6/3).

Yuliot membeberkan bahwa penggunaan HBA sebagai harga acuan untuk ekspor batu bara merupakan langkah yang bakal menguntungkan Indonesia, karena bisa menjaga nilai komoditas itu di pasar global. Kendati, pemerintah tetap membuka peluang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

"Untuk penggunaan HBA ini tetap akan dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya nanti kami bakal lakukan evaluasi," ujarnya. Bahkan, Kementerian ESDM siap memberikan sanksi kepada eksportir batu bara yang belum menggunakan HBA sebagai acuan transaksi penjualan 'emas hitam' di pasar global.

Direktur Jenderal Mineral dan

saat ini memang belum mengenakan sanksi lantaran masih proses transisi kebijakan. Akan tetapi, dia memastikan ke depannya akan ada sanksi khusus terkait dengan kebijakan tersebut.

"Sampai saat ini belum [disanksi]. Akan tetapi, ke depan akan ada sanksi," ucap Tri.

Menurutnya, meski dalam Keputusan Menteri ESDM No. 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara belum mengatur sanksi yang akan dikenakan, eksportir tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran royalti dan pajak yang didasarkan pada perhitungan HBA.

Dengan kata lain, eksportir yang menjual batu bara dengan harga di bawah harga patokan batu bara (HPB) perlu membayar pajak dan royalti yang lebih tinggi dari harga jual aktual batu bara.

"Yang jelas perusahaan yang tidak melaksanakan itu akan dikenakan pajak yang sesuai dengan HPB atau HBA," ucap Tri.

Sebagai catatan, kewajiban penggunaan HBA untuk ekspor batu bara berlaku sejak 1 Maret 2025. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara di pasar global maupun dalam negeri. Dalam penerapannya, sejumlah perusahaan asal China telah menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan baru itu, karena HBA relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga acuan global.

Misalnya saja HBA Februari 2025 yang dipatok US\$124,24 per ton

Newcastle Australia di bursa ICE Futures Europe untuk periode yang sama rata-rata dipatok US\$105 per ton.

Selama ini, kebanyakan pembeli batu bara dari Indonesia mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI). Indeks harga tersebut merupakan acuan harga mingguan batu bara Indonesia di pasar domestik dan internasional yang disusun oleh PT Coalindo Energy dan Argus Media, lembaga *pricing* dari Inggris.

Sementara itu, HBA ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap bulannya, yang kini akan ditetapkan 2 kali dalam sebulan, dan digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan tarif royalti dan harga jual batu bara.

## NEGOSIASI ULANG

Dilansir dari *Bloomberg*, konsultan yang berbasis di China, Fenwei Energy Information Service Co, dalam catatannya menyebut bahwa beberapa perusahaan dari Negeri Panda berusaha untuk membatalkan atau meringkang ulang kontrak jangka panjang batu bara dengan Indonesia.

Senada, Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China juga menyebut HBA telah membuat harga 'emas hitam' asal Indonesia melambung. Hal tersebut dapat menghapus keuntungan perdagangan dan menghambat pembelian dari pembeli di China.

Fenomena penolakan penerapan HBA dari perusahaan China itu juga diamini oleh Indonesian Mining Association (IMA). Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengaku bahwa pihaknya telah mendengar keberatan dari pembeli batu bara asal



**Kami biasa menghadapi protes, tetapi tetap ini adalah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harus diimplementasikan.**

Indonesia, khususnya perusahaan dari China.

Mereka, kata Hendra, keberatan dengan kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia lantaran HBA lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga batu bara lainnya.

"Kami mendengar keberatan dari pihak *buyer* terkait dengan rencana penerapan HBA. Saya kebetulan pada 27 Februari 2025 lalu hadir di acara 2nd China Coal Import International Summit di Guangzhou, dan banyak pertanyaan dari pihak *buyer* terkait dengan hal itu," kata Hendra kepada *Bisnis*.

Hendra pun menyebut para eksportir kini tengah bernegosiasi dengan para *buyer* terkait dengan kontrak *existing*. Alasannya, kontrak yang sudah terjalin masih belum mengacu pada HBA.

"Tentu para eksportir sedang menegosiasikan dengan para *buyer*, karena selama ini mereka sudah ada kontrak yang merujuk kepada indeks tertentu," jelas Hendra.

Secara terpisah, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) berharap penetapan HBA sebagai acuan ekspor batu

Internasional.

"Terkait dengan HBA, PTBA berharap agar penetapan HBA tetap dapat menjaga daya saing industri batu bara Indonesia di pasar internasional," kata Corporate Secretary PTBA Niko Chandra kepada *Bisnis*.

Menurutnya, kebijakan pemerintah itu sebenarnya memiliki niat baik. Niko menilai bahwa kebijakan penggunaan HBA untuk acuan ekspor bertujuan untuk menstabilkan harga batu bara di pasar global.

Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF) Singih Widagdo berpendapat, penggunaan HBA sebagai acuan penjualan ekspor dapat merugikan atau sebaliknya menguntungkan. Apalagi, fluktuasi harga batu bara sangat dinamis.

Singih mengatakan, jika HBA lebih rendah atau di bawah harga yang akan disepakati, maka akan merugikan pemerintah di sisi royalti dan *corporate tax*.

"Sebaliknya jika harga HBA jauh di atas harga riil pasar, bisa jadi *buyer* akan menunda pembelian atau berat menerima harga yang ditawarkan penambang," kata Singih.

Dia menilai, memaksakan harga pada ruang pasar yang terbuka yang bersifat *business-to-business* bukan perkara yang mudah.

Melihat prospek ke depan, khususnya pasar negara importir yang sedang menghadapi transisi energi, maka harga batu bara diproyeksikan relatif akan turun.

Karena itu, kewajiban penggunaan HBA dipastikan akan menyulitkan pelaku usaha. Dia pun menyarankan pemerintah untuk membuat Indonesian Government Coal Index dengan berbagai panel yang terdiri atas wakil *seller*, *trader*, hingga *user*. □



Pemanfaatan Batu Bara Indonesia dalam 6 Tahun Terakhir hingga 2024

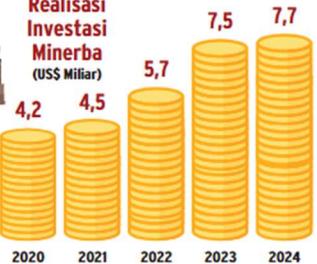
Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa pihaknya

untuk batu bara asal Indonesia dengan kualitas tinggi, sedangkan kontrak berjangka batu bara



bara dapat menjaga daya saing di pasar

Realisasi Investasi Minerba (US\$ Miliar)



Realisasi PNBP Minerba (Rp Triliun)



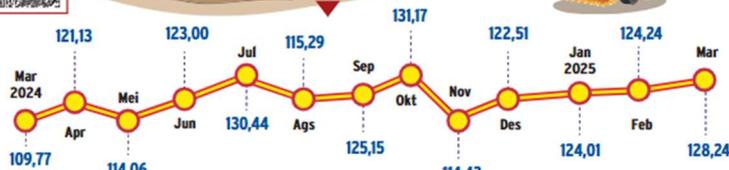
Sumber: Kementerian ESDM

BISNIS/SINTIA NOVIZAH

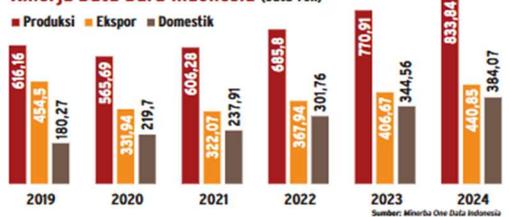
Produksi batu bara di dalam negeri terus mengalami tren peningkatan sejak pandemi Covid-19, dan telah melampaui produksi pada masa prapandemi.

Produksi batu bara sepanjang 2024 kembali memecahkan rekor, karena mencapai 833,84 juta ton dari target 710 juta ton.

## Pergerakan Harga Batu Bara Acuan (US\$ per Ton)



## Kinerja Batu Bara Indonesia (Juta Ton)



Sumber: Minerba One Data Indonesia